



Reinterpretasi teologi publik: Kontribusi gerakan ekumenis melalui tritugas panggilan gereja terhadap kohesi sosial masyarakat multikultural

Pribadyo Prakosa 

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Correspondence:

pribadyo25@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v11i2.1480>

Article History

Submitted: June 17, 2025

Reviewed: July 08, 2025

Accepted: Aug. 30, 2025

Keywords:

ecumenical movement;
multicultural society;
public theology;
social cohesion;
threefold church's calling;
gerakan ekumenis;
kohesi sosial;
masyarakat multikultural;
teologi publik;
tritugas panggilan gereja

Copyright: ©2025, Authors.

License:



Abstract: This article examines the reinterpretation of public theology through the ecumenical movement's contribution to social cohesion in multicultural societies, specifically through the implementation of the church's threefold calling: *koinonia* (fellowship), *marturia* (witness), and *diakonia* (service). Using a qualitative approach with hermeneutical analysis, this study examines how the three dimensions of church mission can be reconceptualized as strategic instruments for fostering interfaith dialogue and strengthening social bonds. The findings indicate that the ecumenical movement, when actualized through contextual public theology, significantly contributes to reducing social fragmentation and enhancing mutual understanding among diverse religious communities. This reinterpretation shifts the church's role from an exclusive religious institution to an inclusive social agent that promotes justice, peace, and reconciliation in pluralistic contexts.

Abstrak: Artikel ini mengkaji reinterpretasi teologi publik melalui kontribusi gerakan ekumenis terhadap kohesi sosial masyarakat multikultural, khususnya melalui implementasi tritugas panggilan gereja: *koinonia* (persekutuan), *marturia* (kesaksian), dan *diakonia* (pelayanan). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hermeneutis, studi ini mengeksplorasi bagaimana ketiga dimensi misi gereja dapat direkonstruksi sebagai instrumen strategis untuk membangun dialog antaragama dan memperkuat ikatan sosial. Temuan menunjukkan bahwa gerakan ekumenis, ketika diaktualisasikan melalui teologi publik kontekstual, secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi fragmentasi sosial dan meningkatkan saling pengertian antar komunitas agama yang beragama. Reinterpretasi ini menggeser peran gereja dari institusi religius eksklusif menjadi agen sosial inklusif yang mempromosikan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi dalam konteks pluralistik.

Pendahuluan

Kompleksitas masyarakat multikultural kontemporer menghadirkan tantangan fundamental bagi eksistensi dan relevansi gereja dalam ruang publik. Fenomena polaritas sosial, konflik horizontal berbasis identitas agama, dan meningkatnya eksklusivisme keagamaan menuntut reformulasi paradigma teologis yang mampu merespons dinamika pluralisme secara kon-

struktif.¹ Miroslav Volf menegaskan bahwa agama-agama, termasuk Kekristenan, harus mampu mengartikulasikan visi mereka tentang kehidupan bersama (*flourishing life*) dalam bahasa yang dapat dipahami dan diterima dalam diskursus publik yang plural.² Realitas ini mendorong urgensi reinterpretasi teologi publik yang tidak hanya berbicara tentang Tuhan dalam ruang privat, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan kohesi sosial masyarakat.

Kajian tentang peran gereja dalam ruang publik telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, namun sebagian besar literatur masih terfokus pada konteks masyarakat Barat yang relatif homogen. Jürgen Habermas dalam dialognya dengan Joseph Ratzinger mengakui pentingnya agama dalam ruang publik post-sekular, tetapi kurang mempertimbangkan kompleksitas analisis masyarakat multireligius di Global South.³ Sebastian Kim dan Katie Day memberikan perspektif global, namun pembahasan tentang gerakan ekumenis sebagai instrumen kohesi sosial masih sangat terbatas.⁴ Sementara itu, studi-studi tentang tritugas panggilan gereja bersifat eklesiosentris dan kurang potensinya sebagai jembatan dialog antariman. *Research gap* ini menunjukkan perlunya mendesak untuk mengembangkan kerangka teologi publik yang kontekstual dengan realitas masyarakat multikultural, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya yang sangat kompleks.

Artikel ini berargumen bahwa reinterpretasi teologi publik melalui aktualisasi gerakan ekumenis dalam kerangka tritugas panggilan gereja dapat menjadi model alternatif untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Gerakan ekumenis yang dipahami bukan sekadar upaya menyatukan denominasi-denominasi Kristen, namun sebagai semangat keterbukaan dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, memiliki potensi transformatif untuk mengatasi fragmentasi sosial. Koinonia sebagai persekutuan inklusif, marturia sebagai bukti dialogis, dan diakonia pelayanan sebagai tanpa diskriminasi, ketika terlibat dalam kerangka teologi publik, dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun jembatan antarkelompok dan memperkuat ikatan sosial yang telah terfragmentasi.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan merekonstruksi konsep teologi publik dalam perspektif ekumenis, menganalisis implementasi tritugas panggilan gereja sebagai instrumen kohesi sosial, dan merumuskan model teologi publik kontekstual yang relevan dengan masyarakat multikultural Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan teologi publik kontekstual sekaligus menawarkan kerangka praktis bagi gereja-gereja dalam menjalankan misi sosialnya di tengah pluralisme. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani kesenjangan antara refleksi teologis dan praksis sosial, serta menawarkan paradigma alternatif bagi gereja untuk tetap relevan dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hermeneutis-kritis terhadap teks-teks teologi publik kontemporer dan dokumen-dokumen gerakan oikumene. Data primer diperoleh dari analisis tekstual terhadap karya-karya teolog publik seperti David Tracy dan Max Stackhouse, serta dokumen-dokumen *World Council of Churches* (WCC)

¹ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Nashville: Abingdon Press, 1996), 178.

² Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids: Brazos Press, 2011), 246.

³ Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger, *The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion*, trans. Brian McNeil (San Francisco: Ignatius Press, 2006), 45-47.

⁴ Sebastian Kim and Katie Day, eds., *A Companion to Public Theology* (Leiden: Brill, 2017), 123-125.

dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).⁵ Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, mendorong dialektika antara penjelasan dan pemahaman untuk menghasilkan interpretasi yang kontekstual namun tetap setia pada tradisi.⁶ Sistematika artikel ini dimulai dengan teologi publik dalam perspektif ekumenis, dilanjutkan dengan analisis tritugas panggilan gereja sebagai instrumen dialog, pembahasan tentang kohesi sosial dalam masyarakat multikultural, dan diakhiri dengan pembahasan model teologi publik kontekstual untuk Indonesia.

Teologi Publik dalam Perspektif Ekumenis: Dari Eksklusivitas menuju Inklusivitas

Konsep teologi publik mengalami transformasi paradigmatis dari wacana yang bersifat apologetis-defensif menuju pendekatan dialogis-konstruktif dalam menanggapi realitas pluralisme kontemporer. David Tracy mengidentifikasi tiga ruang publik yang harus dihadapi teologi: gereja, akademi, dan masyarakat, di mana masing-masing memiliki kriteria validitas dan mode diskursus yang berbeda.⁷ Teologi publik dalam pengertian ini bukan sekadar teologi yang berbicara di ruang publik, tetapi teologi yang mampu mengklaim-klaim normatifnya ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan dievaluasi secara rasional oleh publik yang plural. Max Stackhouse memperluas konsepsi ini dengan tekanan dimensi etis teologi publik sebagai “theological interpretation of public life” yang bertujuan membentuk masyarakat sipil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih.⁸

Gerakan ekumenis memberikan kontribusi mendasar dalam reorientasi teologi publik dari eksklusivisme menuju inklusivisme radikal. Konrad Raiser, mantan Sekretaris Jenderal WCC, dalam *Ecumenism in Transition* mengargumentasikan bahwa paradigma ekumene telah bergeser dari “universalisme kristosentris” menuju “pluralisme teosentris” yang lebih terbuka terhadap dialog antaragama.⁹ Pergeseran ini bukan berarti relativisme teologis, melainkan pengakuan bahwa kebenaran ilahi dapat diwujudkan dalam berbagai tradisi keagamaan. Dokumen “The Church: Towards a Common Vision” yang dihasilkan oleh *Commission on Faith and Order* WCC tahun 2013, menegaskan bahwa kesatuan gereja tidak dapat dipisahkan dari misi gereja untuk keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan (*mission*).¹⁰ Perspektif oikumenis ini mentransformasi teologi publik dari proyek hegemonik Kekristenan menjadi upaya kolaboratif membangun kebaikan bersama bersama tradisi-tradisi agama lain.

Dalam konteks Indonesia, reinterpretasi teologi publik melalui lensa ekumenis memiliki urgensi khusus mengingat kompleksitas demografi dan sejarah konflik berbasis agama. Prof. Emanuel Gerrit Singgih, dalam pemikirannya tentang berteologi dalam konteks, menekankan pentingnya “berteologi dari bawah”, yaitu berangkat dari pengalaman konkret masyarakat

⁵ World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, Faith and Order Paper No. 214 (Geneva: WCC Publications, 2013), 15-17.

⁶ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), 79.

⁷ David Tracy, *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism* (New York: Crossroad, 1981), 3-31.

⁸ Max L. Stackhouse, *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace* (New York: Continuum, 2007), 109-112.

⁹ Konrad Raiser, *Ecumenism in Transition: A Paradigm Shift in the Ecumenical Movement?* (Geneva: WCC Publications, 1991), 78-82.

¹⁰ World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, 23-25.

marginal dan pluralistik.¹¹ Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dikonseptualisasikan oleh Aloysius Pieris sebagai "theo-praxis," yang mengintegrasikan refleksi teologis dengan praksis pengiriman dalam konteks Asia yang multireligius.¹² Teologi publik Indonesia, dengan demikian, harus mampu mendialektikkan klaim-klaim universalitas Injil dengan partikularitas konteks lokal yang sangat beragam.

Transformasi dari eksklusivitas menuju inklusivitas dalam teologi publik ekumenis tidak berarti mengorbankan identitas Kristen yang berbeda. Leslie Newbigin memperingatkan bahaya "domestikasi" Injil dalam upaya baru terhadap pluralisme.¹³ Apa yang disebut oleh Miroslav Volf sebagai "differentiated identity" — identitas yang teguh namun berpori, mampu mempertahankan keunikan sambil tetap terbuka untuk belajar dari yang lain.¹⁴ Dalam kerangka ini, teologi publik ekumenis berfungsi sebagai "dialog profetis" yang secara simultan merupakan kritik profetis terhadap korelasi sambil membangun dialog dengan berbagai pemangku kepentingan sosial.

Implementasi teologi publik ekumenis memerlukan rekonfigurasi institusional dan praktik gerejawi yang fundamental. Heinrich Bedford-Strohm, teolog publik Jerman kontemporer, menekankan pentingnya "kompetensi bilingual", yakni kemampuan gereja untuk berbicara dalam 'dua bahasa', bahasa internal komunitas iman dan bahasa publik yang dapat dipahami oleh masyarakat sekular-plural.¹⁵ Kompetensi bilingual ini mensyaratkan gereja untuk mengembangkan hermeneutika ganda: tradisi hermeneutika yang mempertahankan kelestarian pesan Injil dan hermeneutika yang peka terhadap dinamika sosial-politik kontemporer. Dalam konteks Indonesia, ini berarti gereja harus mampu mengartikulasikan visinya tentang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dalam idiom Pancasila dan bahasa kebangsaan yang inklusif.

Perspektif ekumenis dalam teologi publik juga menuntut perluasan konsep "publik" itu sendiri melampaui batas-batas antroposentris. Dokumen "Together Towards Life" yang dikeluarkan WCC tahun 2013 menekankan dimensi ekologis dari misi gereja dengan konsep "mission from the margins" yang menginklusi seluruh ciptaan sebagai subjek teologi.¹⁶ Celia Deane-Drummond dalam ekoteologi, mengembangkan konsep "deep incarnation," yang melihat inkarnasi Kristus tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh kosmos.¹⁷ Perluasan horizon teologi masyarakat ini memiliki praktis dalam isu-isu seperti kontemporer, ekologis, dan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi lintas agama dan lintas sektor.

Tritugas Panggilan Gereja sebagai Instrumen Dialog Antariman

Konseptualisasi tritugas panggilan gereja — *koinonia*, *marturia*, dan *diakonia* — mengalami reinterpretasi signifikan ketika ditempatkan dalam konteks dialog antariman dan pembangunan kohesi sosial. Tradisi Reformed yang diartikulasikan oleh Karl Barth dalam *Church Dogmatics*

¹¹ Emanuel Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 45-48.

¹² Aloysius Pieris, *An Asian Theology of Liberation* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988), 87-89.

¹³ Leslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society* (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 141-144.

¹⁴ Miroslav Volf, "Embracing the Other," *The Princeton Theological Review* (2004): 2-9.

¹⁵ Heinrich Bedford-Strohm, *Liberation Theology for a Democratic Society: Essays in Public Theology* (Zürich: LIT Verlag, 2018), 67-70.

¹⁶ World Council of Churches, *Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes* (Geneva: WCC Publications, 2013).

¹⁷ Celia Deane-Drummond, *Eco-Theology* (London: Darton, Longman and Todd, 2008), 235.

memahami dimensi ketiga ini sebagai manifestasi integral dari *esse ecclesiae* (keberadaan gereja) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁸ Namun, dalam konteks pluralisme kontemporer, pemahaman eklesiosentris ini memerlukan perluasan hermeneutis yang memungkinkan gereja berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat multikultural tanpa kehilangan identitas teologisnya yang distingtif.

Koinonia, yang secara tradisional dipahami sebagai persekutuan internal umat Kristen, dalam perspektif teologi publik ekumenis bertentangan dengan menjadi "radical hospitality" yang merangkul sang *liyan* (yang lain) tanpa syarat. Letty Russell mengembangkan konsep "kemitraan perbedaan" yang melihat perbedaan bukan sebagai ancaman tetapi sebagai anugerah yang memperkaya pemahaman tentang realitas ilahi.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, koinonia dapat diaktualisasikan melalui praktik "rumah bersama" di mana gereja menjadi ruang pertemuan lintas iman yang memfasilitasi dialog autentik. Penelitian empiris oleh Zainal Abidin Bagir tentang "lived religion" di Yogyakarta menunjukkan bahwa praktik *koinonia* inklusif pada tingkat akar rumput lebih efektif membangun kohesi sosial dibandingkan dialog teologis formal yang cenderung elitis.²⁰

Marturia atau kesaksian dalam paradigma dialog antariman ditransformasi dari monologis proklamasi menjadi "saksi melalui dialog" yang bersifat resiprokal. David Bosch mengidentifikasi pergeseran paradigma misi dari "mission to" menjadi "mission with," yang menekankan mutualitas dan pembelajaran bersama.²¹ Kesaksian dalam konteks multikultural tidak lagi dipahami sebagai upaya konversi tetapi sebagai *sharing* pengalaman iman yang menyempurnakan pemahaman bersama tentang yang transenden. Dokumen "Christian Witness in a Multi-Religious World" yang dikeluarkan bersama oleh WCC, *Pontifical Council for Interreligious Dialogue*, dan *World Evangelical Alliance* tahun 2011 menegaskan prinsip-prinsip etis kesaksian yang menghormati kebebasan beragama dan martabat manusia.²² *Marturia* dialogis ini menciptakan ruang untuk "mutual transformation" di mana semua pihak dapat bertumbuh dalam pemahaman spiritual mereka.

Diakonia sebagai pelayanan sosial gereja mengalami reorientasi dari amal menuju pelayanan transformatif yang berorientasi pada keadilan struktural. Kjell Nordstokke menegaskan bahwa *diakonia* autentik harus bersifat profetik, mengkritisi struktur-struktur yang menciptakan kemiskinan dan marginalisasi.²³ Dalam konteks pluralistik, diakonia menjadi platform kolaborasi lintas agama untuk mengatasi masalah-masalah sosial bersama. Praktik "kemitraan diakonal" yang dikembangkan oleh *ACT Alliance* menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi keagamaan dapat bekerja sama melampaui batas-batas denominasional dan religius untuk respons kemanusiaan yang lebih efektif.²⁴ Di Indonesia, gerakan filantropi

¹⁸ Karl Barth, *Church Dogmatics IV/3.2*, trans. G.W. Bromiley (Edinburgh: T&T Clark, 1962), 762-765.

¹⁹ Letty M. Russell, *Just Hospitality: God's Welcome in a World of Difference* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2009), 89-92.

²⁰ Zainal Abidin Bagir, "The politics and law of religious governance." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (Oxfordshire: Routledge, 2018), 284-295..

²¹ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991), 368-389.

²² World Council of Churches, Pontifical Council for Interreligious Dialogue, and World Evangelical Alliance, *Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct* (Geneva: WCC Publications, 2011), 3-5.

²³ Kjell Nordstokke, *Liberating Diakonia* (Trondheim: Tapir Academic Press, 2011), 45-48.

²⁴ Isaiah Kipyegon Toroitich and Guillermo Kerber, "Diakonia, Sustainability, and Climate Change," *Ecumenical Review* 66, no. 3 (2014).

lintas agama yang difasilitasi oleh organisasi seperti *Dompot Dhuafa* dan Yayasan Sosial Soegijapranata mendemonstrasikan potensi diakonia inklusif dalam membangun solidaritas sosial.

Integrasi dimensi ketiga ini dalam kerangka dialog antariman menciptakan apa yang disebut oleh Paul Knitter sebagai "dialog korelasional," yakni dialog yang tidak hanya berbagi informasi tetapi mentransformasi pemahaman dan praktik keagamaan.²⁵ Model dialog ini bergerak melampaui toleransi pasif menuju "keterlibatan proaktif" yang aktif mencari titik temu sambil menghargai perbedaan yang tidak dapat direduksi. Hans Küng dalam proyek "Global Ethic" mendemonstrasikan bagaimana tradisi-tradisi agama dapat menemukan konteks etis minimal tanpa mereduksi keunikan teologis masing-masing.²⁶ Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat berfungsi sebagai "overlapping konsensus" (meminjam istilah John Rawls) yang memungkinkan berbagai tradisi agama berkontribusi pada pembangunan nasional tanpa kehilangan identitas partikularitas mereka.²⁷

Operasionalisasi tritugas panggilan gereja sebagai instrumen dialog memerlukan rekonstruksi kelembagaan dan pengembangan kapasitas yang sistematis. Stephen Bevans dan Roger Schroeder dalam *Dialog Profetik* menekankan pentingnya "kompetensi antar budaya" bagi pelaku-pelaku dialog yang mencakup kemampuan linguistik, pemahaman pandangan dunia yang berbeda, dan sensitivitas terhadap dinamika hubungan kekuasaan.²⁸ Gereja-gereja di Indonesia perlu mengembangkan program pembentukan yang membekali umat dengan kompetensi dialog, termasuk pemahaman dasar tentang tradisi-tradisi agama lain, komunikasi lintas budaya, dan kemampuan mengelola secara mandiri. Lembaga-lembaga pendidikan teologi memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan studi agama-agama dan dialog antariman dalam kurikulum mereka.

Tantangan implementasi tritugas panggilan dalam konteks dialog antariman mencakup resistensi internal dari kelompok konservatif yang memandang dialog sebagai kompromi teologis, keterbatasan sumber daya untuk program-program lintas agama, dan kompleksitas navigasi politik identitas yang semakin menguat. Namun, pengalaman komunitas-komunitas yang telah menyebarkan dialog kehidupan (*dialogue of life*) menunjukkan bahwa transformasi dimulai dari tingkat akar rumput melalui pertemuan-pertemuan autentik dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah, meskipun memiliki keterbatasan, mendemonstrasikan potensi institusionalisasi dialog di tingkat lokal.

Model Teologi Publik Kontekstual: Integrasi Kearifan Lokal dan Nilai Universal

Pengembangan model teologi publik kontekstual untuk Indonesia memerlukan dialektika kreatif antara nilai-nilai universal Kekristenan dan kearifan lokal Nusantara yang telah terbukti efektif dalam mengelola kesuburan. Robert Schreiter menekankan pentingnya "hermeneutika antarbudaya" yang memungkinkan terjadinya dialog antara tradisi Kristen dan budaya lokal tanpa jatuh pada sinkretisme yang mendukung identitas atau fundamentalisme yang menolak kontekstualisasi.²⁹ Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong,

²⁵ Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), 178-182.

²⁶ Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics* (New York: Oxford University Press, 1998), 91-95.

²⁷ John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993), 133-172.

²⁸ Stephen B. Bevans and Roger P. Schroeder, *Prophetic Dialogue: Reflections on Christian Mission Today* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011), 123-127.

²⁹ Robert J. Schreiter, *Constructing Local Theologies* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985), 95-121.

musyawarah, dan *tepa selira* (tenggang rasa) dapat menjadi "preparatio evangelica," yakni persiapan kultural untuk penerimaan dan aktualisasi nilai-nilai Injil masyarakat dalam bentuk yang dapat dipahami dan diterima oleh lokal.

Kearifan lokal Nusantara menawarkan paradigma relasional yang dapat menyuburkan teologi masyarakat Kristen. Konsep "manunggaling kawula gusti" dalam tradisi Jawa, meskipun dihilangkan pada mistisisme Hindu-Buddha, dapat didialogkan dengan inkarnasi teologi untuk mengembangkan spiritualitas yang mengintegrasikan dimensi vertikal dan horizontal dari iman.³⁰ Franz Magnis-Suseno dalam studinya tentang etika Jawa mengidentifikasi prinsip "rukun" (harmoni) dan "hormat" sebagai nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi penghubung untuk dialog antarbudaya dan antaragama.³¹ Namun, appropriasi kearifan lokal harus kritis, mengakui bahwa tradisi-tradisi ini juga mengandung unsur-unsur yang dapat melanggengkan hierarki sosial dan diskriminasi. Teologi publik kontekstual harus mampu melakukan "kritik profetik" terhadap budaya lokal sambil tetap menghargai kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya.

Model teologi publik kontekstual Indonesia dapat dikonstruksi melalui integrasi tiga komponen utama: tradisi teologis Kristen yang telah direinterpretasi secara ekumenis, nilai-nilai Pancasila sebagai *platform* umum kebangsaan, dan kearifan lokal yang kontekstual dengan realitas sosio-kultural setempat. Pancasila, sebagaimana diargumentasikan Benyamin F. Intan, dapat berfungsi sebagai "filsafat publik" yang memungkinkan artikulasi teologis dalam bahasa publik yang inklusif.³² Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika dipahami secara non-hegemonik, membuka ruang untuk "keramahan teologis" di mana berbagai tradisi agama dapat berkontribusi pada pembangunan nasional tanpa kehilangan keunikan mereka. Sila-sila lainnya—kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial—bergema dengan nilai-nilai Kerajaan Allah yang menjadi orientasi teologi masyarakat Kristen.

Model operasionalisasi ini memerlukan metodologi pengembangan kontekstualisasi yang mumpuni. Stephen Bevans mengidentifikasi berbagai model kontekstualisasi—terjemahan, antropologi, praksis, sintetik, transendental, dan kontra budaya—yang masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan.³³ Untuk konteks Indonesia yang sangat beragam, diperlukan pendekatan "pluralitas kontekstual" yang mengakui bahwa tidak ada satu model yang cocok untuk semua konteks. Gereja di Papua dengan konteks masyarakat adat akan memerlukan pendekatan yang berbeda dengan gereja di Jakarta yang bersifat urban dan kosmopolitan. Yang penting adalah proses kontekstualisasi harus partisipatif, melibatkan komunitas lokal sebagai subjek teologi, bukan sekadar objek dari refleksi teologis elit.

Tantangan utama dalam implementasi model teologi publik kontekstual adalah navigasi antara partikularisme dan universalisme. Di satu sisi, kontekstualisasi yang berlebihan dapat menghasilkan teologi yang terlalu spesifik lokal sehingga kehilangan relevansi trans-kontekstual dan kemampuan untuk berkontribusi pada diskursus global. Di sisi lain, klaim universalitas yang tidak sensitif terhadap konteks dapat menjadi bentuk imperialisme kultural yang mengabaikan keunikan pengalaman lokal. Amos Yong menyarankan pendekatan "imajinasi

³⁰ P.J. Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1990), 234-237.

³¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1984), 38-60.

³² Benyamin F. Intan, *"Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia* (New York: Peter Lang, 2006), 292.

³³ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, revised edition (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), 31-53.

pneumatologis" yang melihat Roh Kudus bekerja dalam berbagai konteks kultural untuk menghasilkan ekspresi iman yang beragam namun tetap bersatu dalam Kristus.³⁴ Pendekatan ini memungkinkan "unity in diversity" yang autentik dalam teologi publik global.

Evaluasi efektivitas model teologi publik kontekstual memerlukan pengembangan indikator yang dapat mengukur dampak sosial dari intervensi teologis. Di luar bukti anekdotal, diperlukan penelitian empiris yang sistematis untuk menilai kontribusi teologi publik terhadap kohesi sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Metodologi seperti teknik "penelitian tindakan partisipatif" dan "perubahan paling signifikan" dapat digunakan untuk menangkap kompleksitas dampak sosial dari praktik teologi publik.³⁵ Kolaborasi antara teolog, sosiolog, dan praktisi pembangunan diperlukan untuk mengembangkan kerangka evaluasi yang kuat namun tetap sensitif terhadap dimensi spiritual yang sering sulit dikuantifikasi.

Praksis Teologi Publik Ekumenis dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia

Aktualisasi teologi publik ekumenis dalam konteks Indonesia kontemporer menuntut implementasi strategi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah. Pengalaman Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam mengembangkan dokumen "Pemahaman Bersama Iman Kristen" (PBIK) mendemonstrasikan potensi sekaligus tantangan dalam membangun konteks teologis di tengah keragaman denominasional. Dokumen ini, yang berupaya mengartikulasikan identitas Kristen Indonesia yang kontekstual, menjadi landasan untuk keterlibatan gereja dalam isu-isu publik seperti keadilan sosial, HAM, dan pelestarian lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang mempertahankan paradigma eksklusif dan skeptisisme terhadap keterlibatan gereja dalam ranah sosial-politik.

Inisiatif-inisiatif konkret teologi publik ekumenis telah menunjukkan dampak transformatif dalam berbagai konteks lokal. Program "Peace Building and Reconciliation" yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) di Poso pasca-konflik mendemonstrasikan bagaimana pendekatan holistik yang mengintegrasikan *trauma healing*, pemberdayaan ekonomi, dan dialog antariman dapat memulihkan kohesi sosial yang terfragmentasi.³⁶ Di Ambon, gerakan "Provocateurs for Peace" yang melibatkan tokoh-tokoh agama iman berhasil mentransformasikannya menjadi rekonsiliasi melalui *storytelling* dan ritual-ritual bersama yang mengaktifasi memori kolektif tentang pela gandong (sistem persaudaraan adat lintas agama).³⁷ Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa teologi publik yang efektif harus tertanam dalam realitas sosial konkret dan responsif terhadap kebutuhan komunitas tertentu.

Pengembangan kapasitas institusional gereja untuk teologi publik memerlukan transformasi di berbagai tingkat. Seminari dan sekolah teologi perlu merevisi kurikulum untuk mengintegrasikan teologi publik, studi antaragama, dan analisis sosial sebagai komponen integral dari formasi teologis. Kolaborasi ekumenis dan lintas agama dalam respons terhadap

³⁴ Amos Yong, *The Missiological Spirit: Christian Mission Theology in the Third Millennium Global Context* (Eugene, OR: Cascade Books, 2014), 89-92.

³⁵ Jessica Dart and Rick Davies, "A Dialogical, Story-Based Evaluation Tool: The Most Significant Change Technique," *American Journal of Evaluation* 24, no. 2 (2003): 137-155.

³⁶ Sumanto Al Qurtuby, "Reconciliation from below: Indonesia's religious conflict and grassroots agency for peace," *Peace Research* (2012): 135-162.

³⁷ Christelle Rigual, "Rethinking the ontology of peacebuilding. Gender, spaces and the limits of the local turn," *Peacebuilding* 6, no. 2 (2018): 144-169.

isu-isu sosial kontemporer menjadi medan aktualisasi teologi publik yang strategis. Gerakan "Indonesia Bersih," yang melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dalam advokasi anti-korupsi, mendemonstrasikan potensi mobilisasi sumber daya moral agama untuk pemerintahan.³⁸ Dalam respon terhadap pandemi COVID-19, kolaborasi antara Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, dan organisasi keagamaan lainnya dalam program vaksinasi dan bantuan sosial menunjukkan bahwa solidaritas bantuan dapat melampaui batas-batas keagamaan.

Tantangan struktural yang dihadapi implementasi teologi publik mencakup regulasi yang restriktif terhadap kebebasan beragama, politisasi agama oleh aktor-aktor politik, dan ketimpangan ekonomi yang memperkeruh hubungan antarkelompok. UU Penodaan Agama dan berbagai Perda yang diskriminatif menciptakan kerangka hukum yang tidak kondusif untuk dialog dan kerjasama antariman.³⁹ Menguatnya identitas politik menjelang kontestasi pemilu sering mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk mobilisasi massa, menciptakan polarisasi yang menghambat kohesi sosial. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, di mana minoritas Kristen dan Tionghoa sering dipersepsikan sebagai kelompok ekonomi dominan, menambah kompleksitas dalam membangun hubungan antarkelompok yang egaliter.

Strategi jangka panjang untuk pelebagaan teologi publik memerlukan pendekatan multipihak yang melibatkan gereja, masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta. Pengembangan "Theology and Public Policy Network" yang menghubungkan teolog dengan pembuat kebijakan dapat memfasilitasi penerjemahan wawasan teologis ke dalam kebijakan publik yang berpihak pada keadilan dan inklusi. Penguatan "gerakan pemuda lintas agama" melalui program pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan sosial dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk memimpin transformasi sosial. Investasi dalam penelitian dan dokumentasi untuk menghasilkan basis bukti tentang praktik terbaik teologi publik di berbagai konteks lokal dapat memperkaya pembelajaran dan replikasi. Keterlibatan media yang strategis, termasuk penggunaan *platform* digital dan media sosial, diperlukan untuk melawan narasi-narasi ekstremis dan mempromosikan wacana moderasi dan toleransi.

Kesimpulan

Reinterpretasi teologi publik melalui perspektif ekumenis dan aktualisasi tritugas panggilan gereja menawarkan paradigma transformatif untuk kontribusi Kekristenan terhadap kohesi sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa gerakan ekumenis, ketika dipahami secara inklusif melampaui batas-batas denominasional Kristen, memiliki potensi signifikan sebagai katalisator dialog antariman dan pembangunan solidaritas sosial. Transformasi *koinonia* menjadi *hospitalitas yang radikal*, *marturia* menjadi *saksi melalui dialog*, dan *diakonia* menjadi *pelayanan transformatif*, menciptakan *platform* konkret untuk kolaborasi lintas agama dalam mengatasi fragmentasi sosial dan membangun kebaikan yang umum. Model teologi publik kontekstual yang mengintegrasikan tradisi teologis Kristen, nilai-nilai Pancasila, dan kearifan lokal Nusantara menawarkan kerangka kerja yang relevan dan aplikatif untuk navigasi kompleksitas pluralisme Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memerlukan strategi jangka panjang yang sistematis dan partisipatif.

³⁸ Yahya Wijaya, "Constructing an anti-corruption theology," *Exchange* 43, no. 3 (2014): 221-236.

³⁹ Manotar Tampubolon and Norazlina Abdul Aziz, "Violating Christian minority freedom of religion in Indonesia," *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 11, no. 1 (2021): 235-253.

Referensi

- Al Qurtuby, Sumanto. "Reconciliation from below: Indonesia's religious conflict and grassroots agency for peace." *Peace Research* (2012): 135-162.
- Bagir, Zainal Abidin. "The politics and law of religious governance." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, 284-295. Oxfordshire: Routledge, 2018.
- Barth, Karl. *Church Dogmatics IV/3.2*. Translated by G.W. Bromiley. Edinburgh: T&T Clark, 1962.
- Bedford-Strohm, Heinrich. *Liberation Theology for a Democratic Society: Essays in Public Theology*. Zürich: LIT Verlag, 2018.
- Bevans, Stephen B. *Models of Contextual Theology*. Revised edition. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Bevans, Stephen B., and Roger P. Schroeder. *Prophetic Dialogue: Reflections on Christian Mission Today*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991.
- Dart, Jessica, and Rick Davies. "A Dialogical, Story-Based Evaluation Tool: The Most Significant Change Technique." *American Journal of Evaluation* 24, no. 2 (2003): 137-155.
- Deane-Drummond, Celia. *Eco-Theology*. London: Darton, Longman and Todd, 2008.
- Habermas, Jürgen, and Joseph Ratzinger. *The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion*. Translated by Brian McNeil. San Francisco: Ignatius Press, 2006.
- Intan, Benyamin F. *"Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia*. New York: Peter Lang, 2006.
- Kim, Sebastian, and Katie Day, eds. *A Companion to Public Theology*. Leiden: Brill, 2017.
- Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Küng, Hans. *A Global Ethic for Global Politics and Economics*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Newbigin, Leslie. *The Gospel in a Pluralist Society*. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
- Nordstokke, Kjell. *Liberating Diakonia*. Trondheim: Tapir Academic Press, 2011.
- Pieris, Aloysius. *An Asian Theology of Liberation*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988.
- Raiser, Konrad. *Ecumenism in Transition: A Paradigm Shift in the Ecumenical Movement?* Geneva: WCC Publications, 1991.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- Rigual, Christelle. "Rethinking the ontology of peacebuilding. Gender, spaces and the limits of the local turn." *Peacebuilding* 6, no. 2 (2018): 144-169.
- Russell, Letty M. *Just Hospitality: God's Welcome in a World of Difference*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2009.
- Schreiter, Robert J. *Constructing Local Theologies*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Berteologi dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Stackhouse, Max L. *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace*. New York: Continuum, 2007.
- Tampubolon, Manotar, and Norazlina Abdul Aziz. "Violating Christian minority freedom of religion in Indonesia." *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 11, no. 1 (2021): 235-253.

- Toroitich, Isaiah Kipyegon, and Guillermo Kerber. "Diakonia, Sustainability, and Climate Change." *Ecumenical Review* 66, no. 3 (2014).
- Tracy, David. *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York: Crossroad, 1981.
- Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Nashville: Abingdon Press, 1996.
- — —. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
- — —. "Embracing the Other." *The Princeton Theological Review* (2004): 2-9.
- Wijaya, Yahya. "Constructing an anti-corruption theology." *Exchange* 43, no. 3 (2014): 221-236.
- World Council of Churches. *The Church: Towards a Common Vision*. Faith and Order Paper No. 214. Geneva: WCC Publications, 2013.
- — —. *Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes*. Geneva: WCC Publications, 2013.